

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini menjelaskan tentang strategi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang sama-sama membahas peningkatan kesejahteraan pedagang kaki lima:

1. Penelitian Indah Istikarini (Mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang) yang dilakukan pada tahun 2005 dengan judul skripsi yaitu “Implementasi perda no.1 tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan pkL dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan pkL di kota malang.” Hasil dari penelitian tersebut adalah upaya peningkatan kesejahteraan pkL di kota Malang sesuai dengan peraturan perda no.1 tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima, dengan mengatur lokasi yang telah ditentukan, mengarahkan PKL untuk mengetahui, memperhatikan kawasan bebas PKL, dan mengadakan pembinaan yang berkesinambungan. Dan dari hasil penelitian kebijakan yang telah dibuat ini dianggap tepat dan strategis dan membuat pengunjung banyak yang berdatangan kesana sehingga hal ini membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama kesejahteraan pedagang kaki lima. Bedanya fokus peneliti adalah strategi pemerintah khususnya Dinas perindustrian dan perdagangan dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima.

2. Penelitian Cicik Triwulan (Mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang) yang dilakukan pada tahun 2008 dengan judul skripsi yaitu “implementasi Perda No.5 Tahun 2005 Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Mojokerto.” Hasil dari penelitian Cicik Triwulan hampir sama dengan peneliti, hanya saja penelitian yang dilakukan lebih pada penertiban PKL dan hambatan pemerintah dalam merelokasi. Sedangkan fokus peneliti pada strategi peningkatan kesejahteraan pedagang kaki lima berbasis wisata kuliner di Kota Blitar.
3. Penelitian Fransisco Galih Pratama (Mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang) yang dilakukan pada tahun 2011 dengan judul skripsi yaitu “Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (studi bidang perdagangan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Kediri).” Penelitian yang dilakukan oleh Fransisco Galih Pratama memiliki persamaan dengan peneliti, hanya saja penelitian tersebut lebih terfokus pada kebijakan relokasi. Sedangkan peneliti lebih ke bentuk pada strategi pemerintah meningkatkan kesejahteraan PKL berbasis wisata kuliner.

B. Strategi

1. Pengertian strategi

Menurut (Marrus, 2002: 31) strategi didefinisikan sebagai proses penentuan rencana pemimpin yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi dan disertai penyusunan cara atau upaya agar tujuannya tercapai.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan cara bertindak untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Strategi berdasarkan pada penyesuaian untuk mengadakan reaksi terhadap situasi lingkungan tertentu yang dapat dianggap penting, Dimana tindakan penyesuaian tersebut dilakukan secara sadar berdasarkan pertimbangan yang wajar dengan memperhitungkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki agar lebih efektif dalam pelaksanaannya.

2. Syarat-syarat Strategi

Suatu perencanaan agar berjalan dengan sesuai sasaran dan bias diterapkan secara efektif atau efisien. Maka terdapat syarat penting yang harus diperhatikan dalam menyusun strategi menurut (Siagan, 2003: 102), yaitu:

1. Strategi harus mampu disuatu pihak memperoleh manfaat dan berbagai peluang yang diperkirakan akan timbul dan pihak lain memperkecil dampak berbagai faktor yang sifatnya negatif atau bahkan berupa ancaman bagi organisasi dan kelangsungannya.
2. Strategi harus diperhitungkan secara realistis kemampuannya suatu organisasi dalam menyediakan berbagai daya, sarana, prasarana, dan dana yang diperlukan untuk mengoprasionalkan strategi tersebut.
3. Strategi yang telah ditentukan diopresionalkan secara teliti. Tolak ukur tepat atau tidaknya suatu strategi bukan terlihat pada proses perumusan saja, namun juga mencakup oprasional atau pelaksanaannya.

3. Manfaat Strategi

Dalam menentukan suatu strategi tidak lepas dari perencanaan kegiatan yang akan dicapai dimasa mendatang. Setiap strategi dalam organisasi baik pemerintah maupun swasta tentu memiliki manfaat yang sesuai dengan harapan. Manfaat dari penetapan strategi pada organisasi yakni, suatu perencanaan melalui identifikasi rincian yang lebih spesifik tentang bagaimana organisasi harus mengelola bidang-bidang yang ada dimasa mendatang dala rangka penetapan sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini agar mempermudah koordinasi bagi semua pihak agar memiliki partisipasi dan preseps yang sama tentang bentuk serta sifat interaksi, interdependensi dan interelasi” (Siagan, 2003: 206).

C. Kesejahteraan Sosial

1. Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial jika diartikan secara harfiah memiliki makna yang luas dan mencakup macam-macam segi pandangan tentang sesuatu hal yang menjadi cirri-ciri dari pengertian tersebut. Kesejahteraan bermula dari kata *sejahtera* yang hidupnya makmur, sehat, dan aman sentosa, artinya terbebas dari segala macam gangguan dan kesukaran. Sedangkan istilah ‘Sosial’ yaitu berasal dari kata *Socius* yang artinya teman, kawan, dan gotong royong. (Fahrudin, 2012: 8)

Kesejahteraan sosial dengan bermacam-macam kegiatan yang meliputi semua bentuk intervensi sosial, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan

atau kebahagiaan tiap individu, kelompok, maupun masyarakat keseluruhan. Kesejahteraan sosial ditujukan guna mencapai produktivitas yang maksimum, masyarakat perlu cara untuk lebih meningkatkan kemampuan, melindungi masyarakat dari masalah dan gangguan yang bisa mengurangi dan merusak kemampuan yang telah dimiliki.

Namun secara umum, istilah kesejahteraan sosial merupakan keadaan terpenuhinya segala aspek kehidupan yang sifatnya mendasar seperti halnya pakaian, makanan, pendidikan, perumahan, dan perawatan kesehatan.

Beberapa makna menjelaskan kesejahteraan sosial yang relatif berbeda walaupun substansinya sama, diantaranya:

1. Keadaan yang sejahtera atau kondisi kehidupan dengan terpenuhinya kebutuhan rohaniah, jasmaniah dan sosial.
2. Institusi, lokasi atau bidang kegiatan yang mana melibatkan beberapa lembaga-lembaga kesejahteraan sosial dan profesi kemanusiaan yang mengadakan kegiatan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.
3. Aktivitas, merupakan kegiatan ataupun usaha yang terstruktur demi tercapainya kondisi yang sejahtera (Suharto, 2014: 2-3).

Berdasarkan konsep kesejahteraan sosial terdapat beberapa definisi tentang kesejahteraan sosial (Fahrudin, Adi, 2012: 9)

Friedlander (1980):

“kesejahteraan sosial yaitu pelayanan-pelayanan sosial dan institusi yang terstruktur dan dirancang untuk membantu individu dan kelompok demi tercapainya standart hidup dan kesehatan yang mencukupi dan relasi sosial maupun personal sehingga dapat memungkinkan untuk mereka kembangkan kemampuan-kemampuan dan kesejahteraan sehubungan dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat”

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB):

“Kesejahteraan sosial adalah suatu bentuk kegiatan yang terorganisir dengan maksud tujuan membantu dalam penyesuaian timbale balik antara individu dengan lingkungan sosial setempat. Tujuan ini dicapai melalui metode dan teknik dengan tujuan supaya memungkinkan individu, komunitas, maupun kelompok demi memenuhi kebutuhan dan mampu memecahkan masalah penyesuaian diri mereka dengan perubahan pola masyarakat, dan melalui tindakan kerjasama untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi”.

UU NO.6 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1:

“Kesejahteraan Sosial merupakan kehidupan dan penghidupan sosial, materiil maupun spiritual yang meliputi rasa kesusilaan, keselamatan, dan ketrataman lahir batin, yang memungkinkan setiap warganegara dapat mengadakan usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang jasmaniah, rohaniah, dan sosial sebaik-baiknya bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia yang sesuai dengan Pancasila”.

2. Tujuan Kesejahteraan Sosial

a. Tujuan

Kesejahteraan sosial memiliki beberapa tujuan Adapun tujuan tersebut yaitu:

1. Untuk meningkatkan hidup yang sejahtera dalam arti terpenuhinya standart kehidupan seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan relasi sosial yang baik dengan lingkungan sekitarnya.
2. Tercapainya penyesuaian diri yang baik dengan masyarakat di lingkungannya, seperti halnya dengan mencari sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan keadaan hidup yang memuaskan.

3. Indikator Keluarga Sejahtera

Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN, 2011) menentukan beberapa indikator tingkat kesejahteraan keluarga. Digolongkan menjadi 5 (lima) tahapan indikator, sebagai berikut:

1) Keluarga Pra Sejahtera (Pra-KS)

Digolongkan “sangat miskin”, yang mana keluarga tersebut belum dapat memenuhi dari salah satu atau lebih indikator yang meliputi:

a) Indikator ekonomi:

1. Memiliki pakaian yang berbeda untuk beraktivitas (contohnya di rumah, sekolah/bekerja atau berpergian)
2. Anggota keluarga makan 2 kali atau lebih
3. Bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah

b) Indikator Non-Ekonomi

1. Melaksanakan ibadah
2. Bila anak sakit dibawa ke sarana kesehatan

2) Keluarga Sejahtera I (KS I)

Digolongkan “Miskin”, keluarga yang karena alasan ekonominya tidak bisa memenuhi dari salah satu atau lebih, indikatornya yaitu:

a) Indikator ekonomi

1. Paling kurang keluarga seminggu sekali makan daging, telur, atau ikan.
2. Setaun terakhir keluarga memperoleh sedikitnya satu stel pakaian baru
3. Luas lantai rumah paling kurang 8 m untuk setiap penghuni

b) Indikator Non-Ekonomi

1. Ibadah teratur
2. Sehat dalam 3 bulan terakhir
3. Tidak Memiliki penghasilan tetap
4. Usia 10-60 tahun dapat membaca tulis huruf latin
5. Usia 6-15 tahun bersekolah
6. Anak lebih dari 2 orang, ber-KB (Keluarga Berencana)

3) Keluarga Sejahtera II (KS II)

Keluarga karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi dari salah satu atau lebih dari indikator diantaranya:

- a) Makan bersama sambil berkomunikasi dengan keluarga
- b) Memiliki tabungan keluarga
- c) Rekreasi bersama (6bulan sekali)
- d) Mengikuti kegiatan masyarakat
- e) Mendapatkan berita dari surat kabar, TV, majalah, dan radio.
- f) Meningkatkan dalam pengetahuan agama
- g) Menggunakan sarana transportasi

4) Keluarga Sejahtera III (KS III)

Keluarga yang dapat memenuhi indikator, diantaranya:

- a) Makan bersama sambil berkomunikasi
- b) Mengikuti kegiatan masyarakat
- c) Meningkatkan pengetahuan agama
- d) Memiliki tabungan keluarga

- e) Menggunakan sarana transportasi
 - f) Rekreasi bersama (6 bulan sekali)
 - g) Memperoleh berita dari surat kabar, TV, majalah, dan radio
- 5) Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus)

Keluarga yang dapat memenuhi beberapa indikator, diantaranya:

- a) Aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan
- b) aktif dalam memberikan sumbangan material secara teratur

D. Pedagang Kaki Lima

1. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Peraturan daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2008, Pedagang kaki lima adalah pedagang yang dalam menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usahanya disebut PKL.

(Sumber: Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima)

Pedagang kaki lima di Era Modern saat ini sudah sangat populer dan dapat ditemukan di setiap sudut keramaian. Kepopuleran pedagang kaki lima ini mungkin bisa dari hal yang positif dan ada juga yang mengartikan dari sisi negatif. Positifnya PKL bisa menyerap lapangan pekerjaan dari banyaknya pengangguran. Para penganggur ini mencoba untuk berwirausaha, berkreasi, dengan modal kecil ataupun tanpa modal.

Negatifnya, masih banyak pedagang kaki lima yang tidak memperhatikan tata tertib, kebersihan, keamanan, dan kebisingan (Alma, 2009: 155-156).

Dari beberapa pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa pedagang kaki lima adalah kegiatan ekonomi di sektor informal. Pedagang kaki lima adalah orang yang membuka usaha dalam bidang produksi ataupun jasa yang hanya dengan modal relatif kecil dan menempati ruang publik.

2. Dampak Keberadaan PKL

Sektor informal sering dijadikan sebagai kambing hitam sebagai penyebab kesemrawutan lalu lintas ataupun kebersihan lingkungan. Namun demikian sektor informal dapat membantu masyarakat dalam menyediakan lapangan pekerjaan, dan selain itu sektor informal ternyata mampu menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang relatif murah bagi masyarakat menengah ke bawah. Beberapa permasalahan keberadaan PKL ada yang berdampak positif dan negatif. Dampak positif keberadaan PKL diantaranya:

a. Mampu memenuhi kebutuhan masyarakat

Keberadaan pedagang kaki lima sangat banyak membantu hampir seluruh kalangan masyarakat, baik tingkat ekonomi rendah, maupun ekonomi tinggi.

b. Menambah Pendapatan Daerah

Adanya pedagang kaki lima, secara tidak langsung pemerintah dapat menarik retribusi dari para pedagang kaki lima ini, hal ini jelas menambah pendapatan dari pihak pemda sendiri.

c. Memberikan lapangan pekerjaan

Dengan semakin banyaknya pedagang kaki lima yang tersebar di beberapa lokasi maka hal ini akan banyak menyerap tenaga kerja yang masih belum mendapatkan pekerjaan. Banyaknya masyarakat yang memilih alternatif pekerjaan menjadi pedagang kaki lima disebabkan bahwa untuk menjadi pedagang kaki lima tidak adanya tuntutan syarat khusus seperti pendidikan, keterampilan dan modal yang cukup besar. Pekerjaan di kota membuktikan bahwa tidak semua penduduk kota dapat menyerap seluruh pekerjaan formal dan hanya sebagian kecil saja. Dengan masih banyaknya jumlah penduduk yang tidak mendapat pekerjaan yang ada di perkotaan, hal ini membuat sektor informal seperti pedagang kaki lima mampu menyerap tenaga kerja yang belum ataupun tidak mendapatkan pekerjaan di kota.

Adapun dampak negatif dari keberadaan pedagang kaki lima yaitu:

a. Ketertiban

Adanya masalah yang timbul dari ketertiban pedagang kaki lima ini sendiri karena kurangnya kesadaran dan perhatian dari pedagang kaki lima dalam memposisikan barang-barang ataupun peralatan yang digunakan seperti perlengkapan untuk berjualan tenda, gerobak, dan lain-lain yang masih ditinggal dilokasi walaupun pemerintah daerah telah memberikan intruksi untuk membersihkan tempat setelah berjualan. Selain itu pedagang kaki lima tak jarang berpindah-pindah lokasi berjualan dan akhirnya membuat ruwet pengaturan kota dan ketertiban.

b. Kebersihan kota

Masih banyak pedagang kaki lima yang kurang memperhatikan kebersihan sehingga kebersihan kota akan terganggu. Seperti membuang sampah yang seharusnya bukan pada tempatnya dan akhirnya menimbulkan bau dan pemandangan yang tidak sedap. Selain itu juga tenda-tenda kumuh di jalan-jalan umum.

c. Kemacetan lalu lintas

Masalah ini ditimbulkan karena banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar jalan, emper-emper toko yang dapat mengganggu pejalan kaki maupun lalu lintas kendaraan, karena penuhnya pedagang kaki lima tersebut di trotoar jalan ataupun di tepi jalan, dengan demikian jalan akan menjadi lebih sempit dan hal ini mengganggu kelancaran ataupun ketertiban lalu lintas.

E. Wisata Kuliner

Menurut (Poerdaminta, 2003) Wisata merupakan kegiatan berpergian secara bersama-sama untuk bersenang-senang, bertamasya, ataupun menambah pengetahuan dsb. Sedangkan kuliner yaitu makanan atau masakan. Sedangkan Menurut Hall and Sharples, dkk (2003) wisata kuliner merupakan kunjungan ke tempat yang menyediakan bermacam-macam jenis makanan, festival makanan, dan restoran atau lokasi yang memang khusus untuk merasakan makanan yang beranekaragam dan mendapatkan suatu pengalaman dari makanan khas yang ditawarkan tersebut guna untuk memotivasi wisatawan dalam melakukan perjalanan

berwisata. Jadi dapat dijelaskan bahwa wisata kuliner adalah lokasi atau keadaan lingkungan sebagai objek tujuan berwisata dan menyediakan beberapa makanan atau minuman baik instan maupun tradisional.

